

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara sesuai dengan cita-cita nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional dirancang secara berkelanjutan melibatkan seluruh bagian bangsa. Ada berbagai aspek dalam Pembangunan nasional yang harus didukung oleh pembangunan di tingkat daerah. Pembangunan daerah berperan sebagai fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih spesifik dan merata, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Mengingat Indonesia memiliki beragam perbedaan, setiap daerah memerlukan strategi pembangunan yang selaras dengan karakteristik masing-masing. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Hal ini menunjukkan bahwa guna mewujudkan pembangunan nasional yang seimbang dan adil, negara harus menerapkan sistem pemerintahan daerah yang otonom. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi seluruh penduduk serta mampu mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan daerah.

Selain memberikan kesempatan bagi daerah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas daerah tersebut. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang memadai. Salah satu faktor yang mendukung kemajuan suatu daerah adalah tersedianya pembiayaan yang memadai, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Effendi, 2022). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Merujuk pada ketentuan

tersebut maka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah membutuhkan fokus yang serius agar daerah dapat mandiri dan tidak terlalu bersandar pada pemerintah pusat (Maya S, 2014 dalam Tantriana, 2023). Sumber daya keuangan yang stabil dan dikelola dengan baik memungkinkan daerah untuk menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat.

Letak geografis Indonesia yang menguntungkan turut menyumbang kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya. Sehubungan dengan hal tersebut pariwisata menjadi bagian strategis dalam membangun ekonomi Indonesia. Dalam konteks pembangunan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana kemandirian dan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (Santoso et al., 2023).

Meninjau kembali masa pandemi pada tahun 2020 silam yang berdampak pada merosotnya perekonomian Indonesia. Salah satu sektor perekonomian yang terdampak pada tahap awal adalah sektor pariwisata (Budastra, 2020). Sementara sektor ini berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara. Pembatasan sosial dan perjalanan yang dilakukan guna mencegah penyebaran covid 19 semakin diperketat menjadikan banyak destinasi wisata yang harus terpaksa tutup sehingga sektor pariwisata menghadapi tantangan besar akibat dampak pandemi yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan menghambat aktivitas pariwisata. Laporan BPS tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sebanyak 4,02 juta kunjungan, mengalami penurunan drastis sebesar 75,03% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 16,11 juta kunjungan (Fika, 2021). Dengan penurunan kunjungan wisatawan beberapa pelaku usaha seperti hotel, restoran dan hiburan juga terkena dampaknya yang dimana hal tersebut juga menjadikan pendapatan daerah menurun termasuk sektor pajak daerah yang menjadi salah satu

sumber utama pembiayaan pembangunan daerah sendiri. Seiring berjalannya waktu masa pandemi mulai mengalami pemulihan dengan dilakukannya pencabutan PPKM yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 dimana kondisi pandemi mulai mereda dan terkendali serta menunjukkan dimulainya masa transisi menuju pasca pandemi (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, 2022). Pada 5 Mei 2023 WHO menyatakan mengakhiri status darurat pandemi covid 19 secara resmi (WHO, 2023), kemudian pada 21 Juni 2023 pemerintah indonesia resmi mengakhiri status pandemi dan dimulainya masa pasca pandemi tepat pada pertengahan tahun 2023 (Humas, 2023). Pada masa ini pemerintah mulai fokus pada strategi pemulihan untuk mendukung ekonomi yang sempat terpuruk selama pandemi, beberapa sektor mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan salah satunya sektor pariwisata juga mulai mengalami kebangkitan kembali.

Setelah masa pandemi, sektor pariwisata Indonesia mulai pulih secara bertahap. Menurut statistik BPS terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman pada Januari hingga September 2023 sebesar 143,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian terdapat perjalanan wisatawan lokal di Indonesia tercatat mencapai 192,52 juta pada Juli hingga September 2023 (Aurellia, 2023). Dengan peningkatan jumlah wisatawan banyak usaha seperti restoran, hotel, dan penyedia jasa pariwisata juga mengalami peningkatan permintaan.

Kabupaten Kuningan, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang terkenal dengan Kawasan pegunungannya menjadikan kuningan memiliki potensi pariwisata yang menguntungkan. Keberagaman tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Elemen utama penyusun PAD yang berkontribusi paling tinggi adalah pajak daerah (Novalistia, 2016 dalam Saraswati & Nurharjanti, 2021). Pajak daerah merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang

dibayarkan kepada negara untuk membiayai Pembangunan fasilitas umum guna kepentingan Masyarakat. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan pajak daerah di sektor pariwisata (Karini & Agustiani, 2019).

Tabel I. 1
Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun	PAD	Pajak Daerah
2020	295,500,359,905	84,317,475,248
2021	343,817,992,050	92,331,986,827
2022	346,586,033,112	107,678,513,745
2023	350,362,663,121	122,612,598,317
2024	313,310,613,434	135,993,978,833

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan data realisasi pendapatan pemerintah kabupaten kuningan yang bersumber dari Badan Pengelolaan pendapatan asli daerah kabupaten kuningan dapat dilihat realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Meski demikian, pada masa pemulihan menjadi tantangan yang lebih besar bagi setiap daerah untuk memulai kembali perekonomian daerahnya dari masa kritis pandemi covid 19, dengan adanya pemulihan ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, kontribusi pajak daerah di sektor ini diharapkan dapat meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Namun, meskipun sektor pariwisata berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang berasal dari sektor ini perlu dianalisis secara lebih mendalam. Data dan analisis yang komprehensif dibutuhkan untuk memahami dinamika ini, terutama pada masa pandemi hingga masa transisi dari masa pemulihan sampai pasca-pandemi COVID-19. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah yang diterima dari sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif dan maksimal terhadap

peningkatan PAD Kabupaten Kuningan, serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ini. sehingga analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pajak daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kuningan.

Penelitian tentang efektivitas dan kontribusi pajak hiburan (Shilfia; Mar'atus & Linawati 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2020-2022 dinilai “sangat efektif” dengan nilai persentase rata-rata diangka 105 %. Namun, kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kediri pada tahun 2020-2022 memenuhi kriteria “sangat buruk” dengan persentase rata-rata 1%.

Penelitian (Alexander, Elfreda & Suyatin; 2023) Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan cukup efektif rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 107,7%. pajak restoran sebesar 107,8%. dan pajak hiburan 99,44%. serta berkontribusi baik dengan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 4,08%. tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 11,06% dan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 3.01% terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda.

Dalam penelitian (Yessica & Theresya; 2021) kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Jakarta selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 3,97% maka pajak hotel sudah memiliki kontribusi yang baik, kontribusi pajak restoran secara rata-rata sebesar 6,57% maka pajak restoran sangat memiliki kontribusi. Kontribusi pajak hiburan secara rata-rata sebesar 1,83% maka pajak hiburan kurang memiliki kontribusi.

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah tempat dan periode penelitian, tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan. Peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang efektivitas dan kontribusi pajak pada sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kuningan karena ingin mengetahui seberapa besar Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli

daerah kabupaten kuningan.

berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kuningan yang berjudul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan Pada Masa Pandemi dan Pasca Pandemi covid 19*”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang penulis jelaskan pada bagian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana tingkat Kontribusi Pajak Daerah Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui tingkat Kontribusi Pajak Daerah Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa atau dosen terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah khususnya pada sektor pariwisata dan dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi dalam pembelajaran berkaitan dengan keuangan daerah dan perpajakan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel yang lebih efektif.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami lebih dalam mengenai perpajakan daerah dan memperluas wawasan terkait pajak daerah dan pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD serta mengasah kemampuan penulis dalam berpikir kritis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan bahan evaluasi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya sebagai dasar dalam topik serupa serta sumber referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan daerah dan pengelolaan PAD.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian,

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan teori terkait dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka pemikiran, yang dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Kemudian pada bagian akhir terdapat hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, jenis data dan teknik pengumpulan data. Kemudian pada bagian akhir terdapat penjelasan mengenai teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil dari pengambilan data penelitian, hasil dari analisis data penelitian, hasil dari pengujian hipotesis serta pembahasan hasil pengelolaan data penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan disajikan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.